

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Teori Administrasi

Siagian (2003:2) berpendapat Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Lih. Waldo (dalam Faried, 2015: 187) administrasi adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pemikiran).

Menurut Prajudi Admosudirjo (dalam Syafii, 2003:4) Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.

Menurut Luther Gulick (dalam Syafii, 2010:14) Administrasi adalah suatu sistem pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. Sedangkan Hadari Nawawi (dalam Syafii, 2010:14) Mengemukakan bahwa Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja

sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya menurut Pasalong (2014:3), Administrasi merupakan pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Silalahi berpendapat bahwa Administrasi adalah penataan dari kegiatan-kegiatan individu-individu eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi upaya-upaya kerja sama sekelompok individu-individu untuk merealisasikan beberapa tujuan yang telah ditentukan (dalam Zulkifli 2014:10).

Menurut The Liang Gie mendefinisikan Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Zulkifli 2014:14). Pekerjaan pokok yang dimaksudkan mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umum administrasi tersebut meliputi :

1. Organisasi (tatakeragaan)
2. Manajemen (tata pimpinan)
3. Komunikasi (tata hubungan)
4. Informasi (tata keterangan)
5. Personalia (tata kepegawaian)
6. Finansia (tata keuangan)
7. Materialia (tata pembekalan)
8. Relasi publik (tata humas)

Sedangkan Menurut Leonard D. White (dalam Syafri Wirman 2003:10) Mendefinisikan bahwa Administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjukkan dua hal, yakni sebagai berikut.

1. Administrasi adalah proses (rangkaiannya)
2. Proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok.

Nigro & Nigro (dalam Syafri Wirman 2003:20) Menjelaskan bahwa Administrasi publik terdiri dari :

1. Adalah usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara;
2. Meliputi ketiga cabang eksekutif (Pemerintahan), legislative (DPR), yudisial/yudikatif (Kehakiman) dan hubungan timbal balik antara ketiganya;

3. Memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik;
4. Berbeda secara signifikan dengan administrasi swasta;
5. Berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwasannya dalam suatu administrasi ada terdapat proses kerja sama rasional serta memiliki unsur-unsur antara lain adalah : manusia, tujuan, tugas serta sarana dan prasarana.

2. Konsep Teori Administrasi Publik

Chandler & Plano (dalam Tahir 2015:2) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dimoock & Dimoock (dalam Pasolong 2016;20) juga mengatn bahwa administrasi publik merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga, mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun kemudian dikendalikan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafii 2010;25) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya gun mencapai tujuan pemerintah.

Sedangkan menurut George J. Gordon (dalam Syafii 2010;25) administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif dan yudikatif.

3. Konsep Teori Organisasi

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuaan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry 2015:14)

Menurut Robbins dan Judge (dalam Feriyanto dan Endang shyta Triana 2015:7) Organisasi merupakan suatu unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih, dikoordinasi secara sadar, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan.

Menurut Massie (dalam Zulkifli 2014:16) Organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang memebagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah mencapai tujuan bersama. Sedangkan Jhon D. Millet (1954) mendefenisikan organisasi sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (dalam Inu Kencana, 2003:113)

Chester L. Bernard (dalam Kencana Inu, 2003:114) Mendefenisikan bahwa Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua atau lebih sesuatu yang tidak berwujud atau tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silahturahmi.

Sedangkan menurut Dwight Waldo (dalam Kencana Inu, 2003:114) bahwa organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan

kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Selanjutnya E. Wight Bakke juga mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiversifikasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya (dalam Kusdi 2009:5).

Menurut Herbert A. Simon (dalam Kencana Inu 2011:11) mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang. Sedangkan Jamwe D. Mooney (dalam Kencana Inu 2011:11) mengatakan bahwa organisasi adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Menurut William B. Eddy (dalam Winardi 2003:39) organisasi paling umum dalam sejarah umat manusia dapat dilukiskan berupa sebuah limas atau piramida. Pada puncak piramida tersebut, terdapat :

1. Pengambilan keputusan
 2. Kekuasaan
 3. Sumber informasi
4. Konsep Teori Manajemen

Geoge Terry mendefenisikan bahwa Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemamfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya (dalam Inu Kencana, 2011:2).

Menurut Ordway Tead (dalam inu kencana 2011:2) mengatakan bahwa manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Stoner, et. Al. (dalam Zulkifli 2014:17) berpendapat bahwa Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisai dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli 2014:18) manurutnya, manajemen sub konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu : Perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan.

Manajemen dapat di defenisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Siagian (dalam Yussa Tarmizi & Hendry Andry 2015:12) mendefenisikan bahwa manajemen dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. Dilihat dari segi fungsionalnya adminitrasi mempunyai dua tugas utama yaitu :

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (organizational goal)
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi (general and overall policies)

Menurut Jhon D. Millet (2003:118) Manajemen merupakan proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, pada garis besarnya manajemen adalah kemampuan mengurus organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semua.

5. Konsep Teori Pelaksanaan

Menurut Grindle (dalam Erwan Agus & Dyah Ratih, 2012;65) bahwa implementasi (pelaksanaan) adalah establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcome of government activity yang dapat diartikan mendirikan sebuah organisasi untuk menjalankan tujuan-tujuan kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah.

Sedangkan Menurut Wahyu dan Nurharjadmo (dalam Deddy Mulyadi, 2016;50) Pelaksanaan merupakan studi untuk mengetahui proses pelaksanaan, tujuan utama proses pelaksanaan itu sendiri untuk memberikan umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standard yang ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

Menurut Smith (dalam Tachjan, 2006;37) dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (Tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. indikator tersebut ialah:

1. Kebijakan yang di idealkan
2. Kelompok sasaran
3. Organisasi pelaksanakan
4. Faktor lingkungan

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan (dalam Tachjan, 2006;39). Berdasarkan teori dari Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2006;39) tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam proses Pelaksanaan iyalah:

1. Standard an Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap Para pelaksana
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

6. Konsep Teori Manajemen Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu dimanajemen.

Menurut Simamora (dalam Sutrisno 2017:5) Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Hassibuan (2014:10) mendefenisikan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan Dale Yoder (dalam Hassibuan 2014:11) mengatakan bahwa manajemen personalia adalah penyedia kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja mereka.

Menurut Edwin F. Flippo (dalam Suwatno dan Donni Juni Priansa 2014 ;29)Manajemen Personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pegadaan, pengembangan, pemberian pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai beberapa tujuan individu organisasi dan masyarakat.

Menurut Gerry Dessler (dalam suparno 2015:2) berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan. Sedangkan menurut Cushway (dalam suparno 2015:4) mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari proses organisasi dalam mencapai tujuan.

Menurut Mahis & Jackson (2012:5) dan Hasibuan (dalam Suparno 2015:3) Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai ilmu atau seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan di setiap perusahaan.

Menurut Noe, Hollembeck, Gerhat, dan Wright (dalam Suparno 2015:3) Manajermen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan, praktis, dan system yang memengaruhi kebiasaan, sikap, dan performa seorang karyawan.

Menurut Bohlander dan snell (dalam suparno 2015:3-4) mendefinisikan bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) yakni suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dalam bekerja.

7. Konsep Teori Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 14 tahun 2014 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, Persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan.

Pengelolaan Pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota/Kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari Desa/Kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara Administrasi sebagai Warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak azasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa Diskriminasi melalui pelayanan publik yang professional. Pendaftaran penduduk dilakukan dengan pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penertiban Dokumen Kependudukan.

Kependudukan berkata dasar dari Penduduk yang mempunyai arti yaitu orang yang tinggal di Daerah tersebut atau orang yang secara hukum berhak tinggal di Daearah tersebut. Dengan kata lain orang yang memepunyai surat resmi untuk tinggal disitu. Misalkan bukti Kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di Daerah lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan

lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

8. Konsep Teori Desa

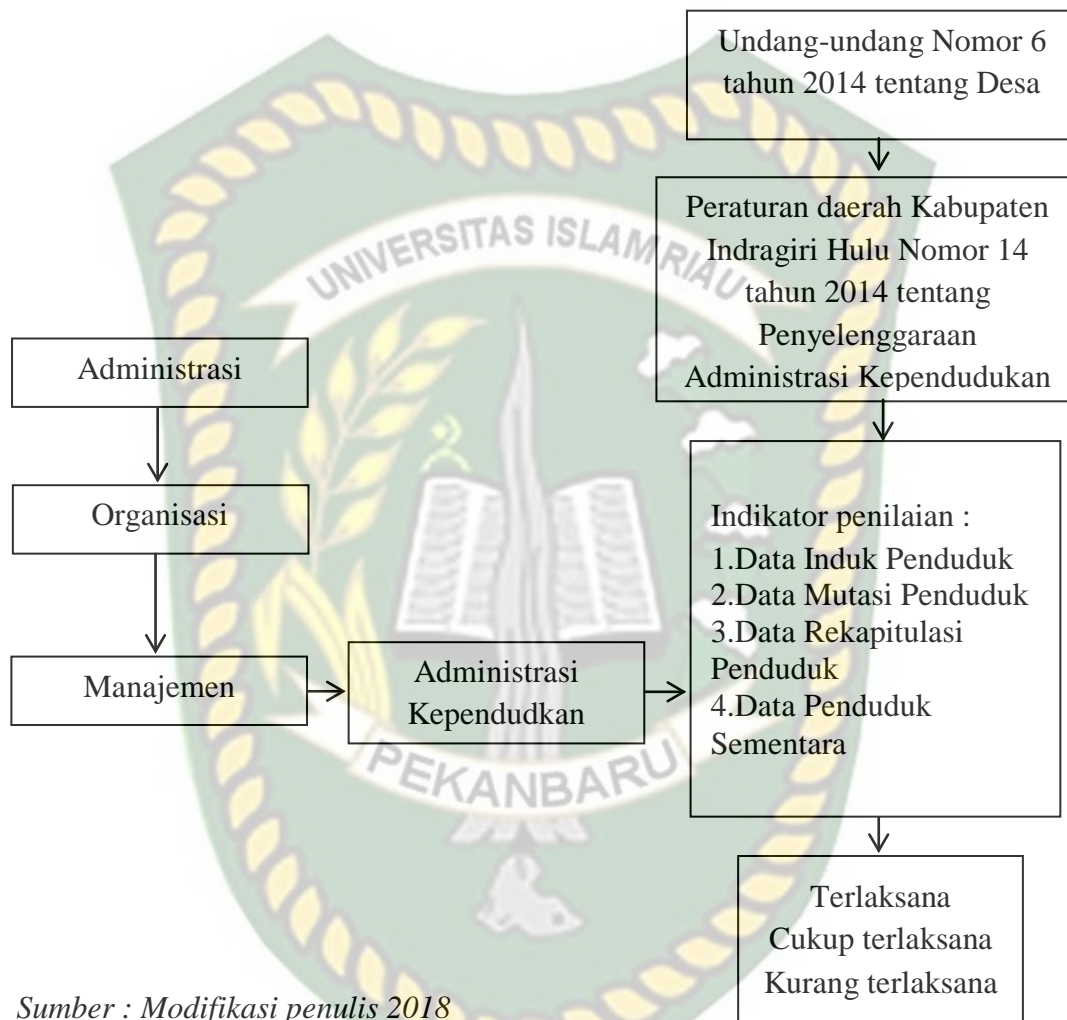
Menurut Ter Haar (dalam Hanif Nurcholis 2011;16) Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat ajeg dengan pemerintah sendiri yang memiliki benda-benda material maupun inmaterial (geordnede groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materiel vermogen).

Dalam undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disini dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini semua yang termasuk kedalam cakupan kajian, baik itu secara teoritis, konsep, maupun lingkup bahasan kajian Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar II.1 :Kerangka pikir tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.



Sumber : Modifikasi penulis 2018

C. Hipotesis

Maka berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan sebelumnya, studi kepustakaan dan kerangka pemikiran, hipotesis penelitian ini dirumuskan **“Diduga Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu belum Terlaksana dengan baik”**.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini peneliti memberi batasan berupa konsep operasional.

Operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Administrasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau kelompok orang tertentu. Administrasi dalam arti sempit diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis. Sedangkan dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah sepakati sebelumnya.
2. Admisistrasi publik adalah suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan sampai proses penilaian yang dilakukan oleh segenap anggota dalam sebuah organisasi guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sejak kebijakan akan dirumuskan.

3. Organisasi adalah wadah untuk melakukan kegiatan administrasi yang terdiri dari kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
4. Manajemen adalah suatu proses yangn digunakan sebagai pengatur jalannya administrasi dalam organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalaui pemamfaatan sumber daya manusia dan lainnya.
5. Pelaksanaan adalah aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.
6. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang mencakup evaluasi terhadap kebutuhan SDM, mendapatkan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan itu, dengan mengoptimasikan pendayagunaan sumber daya yang penting tersebut dengan cara memberikan insentif dan penugasan yang teapat, agar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dimana SDM itu berada.
7. Administrasi Kependudukan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 14 tahun 2014 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Buku Data Induk Penduduk yakni Buku induk kependudukan yang harus dimiliki setiap Desa gunanya sebagai arsip database Desa dimana apabila Desa atau ada pihak lain yang membutuhkan data tentang penduduk para aparat Desa tidak akan direpotkan karena semua data penduduk ada dalam buku induk penduduk.
10. Buku Data Mutasi Penduduk yakni Buku yang memiliki dua unsur yaitu penduduk yang datang dan ini akan mempengaruhi jumlah karena ada penambahan penduduk baru keDesa tersebut. Sedangkan untuk penduduk yang pindah alamat keluar Desa baik dalam Kabupaten atau luar Kabupaten (Provinsi) atau bahkan antar provinsi dan jika ini terjadi juga akan mempengaruhi jumlah penduduk dan adanya pengurangan database penduduk Desa.
11. Buku Data Rekapitulasi Penduduk yakni Buku yang berisikan data penduduk berdasarkan Kartu keluarga, jenis kelamin, statistik data dan lain-lain.
12. Buku Data Penduduk Sementara yakni Buku yang berisikan data orang yang tinggal atau mendiami suatu daerah tertentu yang mempunyai tujuan

untuk pendidikan, kerjaan, atau hal lainyabdengan tidak bermaksud untuk menjadi penduduk tetap pada daerah yang bersangkutan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 :Operasional variabel penelitian Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Administrasi Kependudukan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 14 tahun 2014 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain	Pelaksanaan Penyelenggaraan administrasi kependudukan diDesa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	1. Buku Data Induk Penduduk	a. Pendataan penduduk b. Pembaharuan data	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksan
		2. Buku Data Mutasi Penduduk	a. Pencatatan Kelahiran dan Kematian b. Pencatatan Penduduk Pindah datang	Terlaksana Cukup Terlaksnan Kurang Terlaksana
		3. Buku Data Rekapitulasi Penduduk	a. Data statistik b. Laporan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		4. Buku Data Penduduk Sementara	a. Pendataan b. Laporan tahunan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber : Data olahan penulis 2018

Berdasarkan operasional variabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari konsep pelaksanaan yang berangkat dari kerangka pikir diatas, maka terdapat variabel Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan terdiri dari beberapa indikator yang penulis bahas sesuai dengan kajian penelitian yang diteliti yaitu Pemerintah Desa Baturijal Hulu dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan ditengah-tengah masyarakat Desa Baturijal Hulu tersebut.

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Terlaksanaan, cukup terlaksana dan kurang terlaksana.

Pengukuran yang digunakan ini adalah dengan menggunakan teknik persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Desa Baturijal Hulu Kecamatanm Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan

di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu. 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan
Penyelenggaraan Administrasi kependudukan
di Desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu. 0-33%

Adapun indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Buku Data Induk Penduduk

- Pendataan penduduk
- Pembaharuan data

Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada
ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada
ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada
ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

2. Buku Data Mutasi Penduduk

- Pencatatan Kelahiran dan Kematian
- Pencatatan Penduduk Pindah datang

Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terlaksana : Apabila semua kategori indicator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila semua kategori indicator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

3. Buku Data Rekapitulasi Penduduk

- Data statistik
- Laporan

Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terlaksana : Apabila semua kategori indicator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila semua kategori indicator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

4. Buku Data Penduduk Sementara

- Pendataan
- Laporan Tahunan

Terlaksana : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Terlaksana : Apabila semua kategori indicator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Terlaksana : Apabila semua kategori indicator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

